

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Karangwader

Karangwader sebelumnya desa ini bernama “Desa Donggo” yang bertempat di wilayah selatan desa, sedangkan wilayah utara adalah area persawahan. Seiring berjalannya waktu karena wilayah bagian selatan dipemukiman masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air, lalu para sesepuh menggeser pemukiman agak ke utara. Kemudian membuat sumber mata air di bagian utara yang istilahnya dianggap bisa mencukupi mata airnya, yang berarti masyarakatnya pun ikut bergeser ke wilayah utara agar lebih mudah mendapatkan sumber mata air. Kemudian seiring berjalannya waktu terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan masyarakat kesulitan air lagi. Lalu para sesepuh memilih untuk membuat sumber mata air lagi di wilayah paling utara, dan akhirnya pemukiman masyarakatpun ikut bergeser lagi dan menetap, berkembang sanak pinak sampai sekarang. Daerah selatan yang dulunya ditinggalkan karena kesulitan air seiring kemajuan teknologi dalam membuat sumber mata air, kini wilayah bagian selatan menjadi pemukiman masyarakat lagi.

Nama Karangwader berasal dari kata “coral” (batuan) dan “wader” (ikan), yang mengandung arti mata air (spring) dimana terdapat banyak ikan wader. Diyakini bahwa sang empu, Ki Ageng Donggo, yang berasal dari desa Donggo, diminta oleh Sunan Kalijaga pada hari Minggu Kliwon untuk membuat *sumur* (mata air) di sebelah tenggara, di mana terdapat sebuah bendungan dan menancapkannya dengan tongkat Sunan Kalijaga memutar keluar menjadi air yang jernih. Sunan Kalijaga menginstruksikan Ki Ageng Donggo, “besok jika ada masa (keadaan masa depan) di desa, lokasi ini diberi nama Karangwader, yang berarti suatu tempat yang banyak terdapat ikan-ikan kecil yang disebut ikan wader klumopari.”¹

¹ Wawancara dengan Syaifi selaku Kepala Desa Karang Wader, pada Jum’at 13 Mei 2022, Pukul 08:00 WIB.

2. Visi dan Misi Desa Karangwader

a. Visi Desa Karangwader

Menjadikan Desa Karangwader maju, berdaulat dan mandiri.

b. Misi Desa karangwader

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, mulai dari pertanian, keagamaan, pendidikan dan fasilitas umum.
- 2) Mengangkat sumber potensi Desa Karangwader.
- 3) Menjadikan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dengan kegiatan kajian-kajian islam.
- 4) Melestarikan adat, tradisi, budaya dan sosial Desa Karangwader bersama masyarakat dari anak-anak sampai lanjut usia.

3. Struktur Organisasi Desa Karangwader

Tabel 4.1 Daftar Aparat Pemerintahan Desa Karangwader

No	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Syafii, S.Ag	Kepala Desa
2.	Moh. Hadi	Sekretaris Desa
3.	Trafiji Riyadi	Kadus
4.	Johan	Kadus Bubudan
5.	Tatag Rustiadi	Kadus Ketopo
6.	Sholikhah	Kaur Pemerintahan
7.	Karno	Kaur Kesra
8.	Muslim	Kaur Perencanaan
9.	Munir	Kasi Pelayanan
10.	Ni'am	Kasi Keuangan
11.	Totok	Kasi Umum

Sumber data: Dokumentasi Desa Karangwader

4. Kondisi Geografis Desa Karangwader

Karangwader merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, berada di bagian barat daya yang memerlukan jarak tempuh 15km dari pusat kota, dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Leyangan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bologarang-Pulo Mangin, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tunggu-Watupawon, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pengkol.

Desa Karangwader memiliki luas wilayah 427,24 Ha yang terdiri dari;

Tabel 4.2 luas lahan Desa Karangwaer

No.	Keterangan Lahan	Luas
1.	Sawah/pertanian	207, 24 ha
2.	Permukiman	66 ha
3.	Pendidikan	2 ha
4.	Tempat ibadah	1 ha
5.	Hutan Negara	81.100 ha
6.	Saluran	15 ha
7.	Perkebunan/ Hutan Ralyat	20 ha
8.	Tegalan	32 ha
9.	Jalan Desa	8 ha

Sumber data: Dokumentasi Desa Karangwader

Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa mayoritas masyarakat Desa Karangwader berprofesi sebagai petani, baik masyarakat dari kelas atas, menengah maupun bawah tetap mereka mempunyai lahan pertanian.

5. Kependudukan Desa Karangwader

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Usia

Jumlah penduduk Desa karangwader yaitu 3.560 jiwa yang terbagi laki-laki 1.793 jiwa dan perempuan 1.767 jiwa. Kemudian jumlah penduduk berdasarkan usianya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk berdasarkan usia

No.	Keterangan Usia	Jumlah
1.	Usia 0-19	1099 jiwa
2.	Usia 20-64	2163 jiwa
3.	Usia 65-	298 jiwa

Sumber data: Dokumentasi Desa Karangwader

b. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel 4.4 kependudukan berdasarkan Pendidikan

No.	Golongan Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	95
2.	Sekolah Dasar	331
3.	SMP	116
4.	SMA	232
5.	Sarjana	88
6.	Pondok Pesantren	21
7.	Pendidikan keagamaan	112
8.	Sekolah Luar Biasa	3

Sumber data: Dokumentasi Desa Karangwader

Berdasarkan tabel diatas pendidikan yang banyak ditempuh oleh masyarakat Desa Karangwader tamat SMA dan sederajatnya.

6. Kondisi Sosial Budaya, Sarana dan Prasarana Desa Karangwader

a. Sosial Budaya

Di Desa Karangwader memiliki kebudayaan yang pada umumnya terjadi pada daerah-daerah lain dan masih sangat dilestarikan yaitu Sedekah Bumi (Apitan). Sedekah bumi merupakan suatu kebudayaan yang asli dan ada di masyarakat suku Jawa dan bersifat turun temurun oleh para leluhur. Sedekah bumi ini dilaksanakan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi yang berlimpah berkah ini khusus nya bagi Desa Karangwader sendiri.

Dalam pelaksanaan sedekah bumi (Apitan) yang dilaksanakan di halaman balai Desa Karangwader selain melibatkan kalangan tua juga melibatkan anak-anak, remaja, dan orang dewasa termasuk selain orang tua. Hal ini dilakukan untuk mencegah budaya sedekah bumi (apitan) memudar atau ditinggalkan oleh generasi berikutnya. Generasi muda belajar tentang sedekah bumi (Apitan) dari Pinisepuh, seorang tokoh masyarakat, baik dari segi penerapannya maupun prinsip yang dijunjungnya. Tujuannya lain dilaksanakannya sedekah bumi oleh masyarakat Desa Karangwader memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sedekah bumi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Harapannya diadakannya sedekah bumi disetiap tahunnya maka segala hasil bumi akan melimpah dan bermanfaat. Selain juga untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat desa karangwader, dalam acara sedekah bumi juga terdapat musyawarah dimana masyarakat yang andil dalam pelaksanaan memberikan usulan atau bersuara demi terciptanya masyarakat yang aman dan nyaman.

b. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa karangwader ini untuk masyarakat setempat.

Tabel 4.5 Sarana Dan Prasarana Desa Karangwader

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kantor balai desa	1
2.	Puskesmas	1
3.	Poskesdes	1
4.	UKBM (Posyandu, Polindes)	3
5.	Perpusdes	1
6.	PAUD	2
7.	TK	2
8.	SD	2
9.	Masjid	4
10.	Mushola	28
11.	Olahraga	4
12.	Balai pertemuan	1
13.	Sumur desa	2
14.	Pasar desa	1
15.	Madarasah Diniyyah	1

Sumber data: Dokumentasi Desa Karangwader

Berdasarkan data diatas, semua sarana dan prasarana diatas dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat umumnya, baik yang tidak menjadi penerima bantuan PKH maupun penerima bantuan PKH.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Karakteristik penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Karang Wader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

Salah satu inisiatif pemerintah untuk memerangi kemiskinan di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam situasi ini, PKH menawarkan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Tujuan utama PKH adalah memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan standar sumber daya manusia yang tersedia bagi masyarakat kurang mampu. Dalam jangka pendek, PKH dapat mengurangi beban RSTM Namun, dalam jangka panjang, PKH berupaya memutus lingkaran kemiskinan dengan mendorong masyarakat miskin menyekolahkan anak, memantau kesehatan anak, ibu hamil, dan lansia, dan

penderita disabilitas serta memperbaiki gizi mereka. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini terlaksana di Desa Karangwader mulai tahun 2014 dengan tujuan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat miskin Desa Karangwader. Sasaran utama dalam pelaksanaan PKH di Desa Karangwader adalah rumah tangga sangat miskin yang memiliki salah satu dari beberapa komponen berikut:

- a. Komponen Kesehatan
 - 1) Ibu hamil dengan maksimal dua kali kehamilan
 - 2) Anak usia 0-6 tahun
- b. Komponen Pendidikan
 - 1) Anak Sekolah Dasar (SD) atau sederajat
 - 2) Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat
 - 3) Anak Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat
- c. Komponen Kesejahteraan sosial
 - 1) Lanjut usia mulai 60 tahun keatas, maksimal 1 orang dalam keluarga
 - 1) Penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat, maksimal 1 orang dalam keluarga.

Apabila masyarakat sesuai dengan kriteria ketiga komponen diatas, persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan PKH adalah mengumpulkan fotocopy KK & KTP kepada masing-masing perangkat desa setempat. Di desa Karangwader sendiri semua keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat dua peserta PKH yang dikategorikan mampu untuk membiayai hidupnya serta rumah sangat layak huni, tetapi ini belum dikeluarkan dari kepesertaan PKH. maka pendamping PKH akan secara paksa mengeluarkan dari kepesertaan PKH, yang sebelumnya sudah diberikan sosialisasi. Jadi, KPM yang akan dikeluarkan juga sudah diberikan sosialisasi kenapa dikeluarkan. selain itu seluruh peserta PKH sudah memenuhi kriteria diatas berhak mendapatkan bantuan PKH.

2. **Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Karang Wader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan**

Sasaran utama dalam implemetasi PKH di Desa Karangwader adalah rumah tangga sangat miskin yang memiliki salah satu kriteria dari tiga komponen antara lain

komponen pendidikan, komponen kesehatan dan komponen kesejahteraan sosial. Masing-masing dari ketiga komponen tersebut mendapatkan bantuan tunai yang berbeda-beda. Mekanisme penyaluran bantuan PKH tunai pada tahun 2014-2017 melalui kantor pos. Yang selanjutnya di berikan secara non tunai meliputi:

- a. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial
- b. Sosialisasi dan edukasi
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- d. Proses penyaluran bantuan sosial KPM
- e. Penarikan dana bantuan sosial PKH
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.²

Penyaluran bantuan yang melalui ATM ini bisa diambil sendiri oleh peserta PKH dari masing-masing kartu ATM yang dimiliki.³ Seharusnya maksimal pemberian bantuan PKH sekitar lima tahun, akan tetapi realita yang ada peserta PKH sampai sudah tidak memiliki komponen lagi⁴ atau bisa disebut sudah tidak memiliki kriteria komponen penerima PKH. Jadi kriteria utama dalam penyaluran bantuan PKH yakni wajib miskin, termasuk dalam kriteria komponen PKH, dan terdaftar di Badan Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (yakni basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bansos).

Dalam implementasi PKH yang berlangsung di Desa Karangwader bisa dikatakan salah sasaran bisa juga tidak salah sasaran Siti Yulaikhah mengatakan: “Data penerima bantuan PKH itu langsung dari kementerian sosial yakni langsung dari pusat (Jakarta). Tetapi tetap dari awal pendataan dari desa dilakukan satu tahun dua kali atau bisa dikatakan pemutakhiran data, dengan tujuan untuk memperoleh data secara detail. Dalam pendataan peserta penerima bantuan PKH bisa dikatakan salah sasaran bisa tidak karena petugas maupun pendamping PKH sudah

² Kementerian Sosial, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021*: 9.

³ Siti yulaikhah, wawancara oleh penulis, 10 Mei 2022, wawancara 1 transkrip.

⁴ Kementerian Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*, 2021: 30.

melakukan pendataan awal dari data BDT tiga atau lima tahun sebelumnya. Karena pada saat pendataan posisi orang tersebut tidak mampu, kemudian berjalan tiga atau lima tahun orang tersebut mampu. Jika dikatakan salah sasaran, pihak petugas dari awal sudah menyurvei langsung dari rumah ke rumah dan juga memperoleh informasi dari pihak lain (tetangga). Ketika bantuan PKH berjalan mampu membantu dari segi ekonomi, pihak petugas maupun pendamping PKH berhak mengeluarkan karena sudah dianggap mampu. Ketika yang bersangkutan tidak bersedia dikeluarkan, jika kepala desa mau bertanggung jawab petugas bersedia mengeluarkan tetapi jika kepala desa tidak menyetujui petugas tidak berani untuk mengambil keputusan meski warga tersebut mampu.”

3. **Kendala Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Karang Wader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan**

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu terdapat berbagai kendala yang dihadapi, ada beberapa kendala yang terjadi ketika proses penentuan data penerima bantuan. Kendala yang terjadi kurangnya koordinasi antara pihak pendamping atau pihak dari kecamatan dengan pihak perangkat desa yang berhubungan dengan bantuan PKH, itulah yang menyebabkan munculnya permasalahan di Desa Karangwader.⁵

Kemudian Bapak syafii sebagai kepala desa juga mengatakan:

*“kendala yang memang benar-benar terasa adanya kesalahan pemilihan peserta penerima bantuan PKH. Dimana penerima PKH ada yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah namun terdata dalam BDT. Hal ini harus segera teratasi karena menjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat, yang menjadikan masyarakat banyak yang protes atas ketidaksesuaian kriteria penerima bantuan PKH yang dilihat masyarakat.”*⁶

Selain itu, kendala yang dirasakan oleh Ibu Siti Yulaikhah sebagai pendamping PKH mengatakan:

⁵ Siti Yulaikhah, wawancara oleh penulis, 10 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

⁶ Ahmad syafii, wawancara oleh penulis, 13 Mei 2022, Wawancara 2, transkrip.

“Para KPM PKH banyak yang tidak memiliki kesadaran diri bahwa mereka dapat dikategorikan mampu tapi tidak mau mengundurkan dari peserta PKH. Kendala selanjutnya, para peserta PKH banyak yang menggantungkan hidupnya dari bantuan PKH ini dalam artian “*jagakke*” dan para peserta PKH juga tidak menunggu informasi dari para pendamping saat pencairan dana bantuan bahkan para peserta PKH sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa dana PKH cair dibandingkan pendamping PKH, karena dana bantuan tersebut mudah diambil melalui ATM yang telah diberikan kepada masing-masing peserta penerima bantuan PKH. Kendala lainnya stigma masyarakat yang berfikir bahwa PKH itu daftar-daftaran, sehingga Ibu Yuli sebagai pendamping kebingungan untuk menghadapi masyarakat yang terus berdatangan untuk mendapat penjelasan. Namun, karena disetiap pekerjaan sudah pasti akan ada kendala atau hambatannya, justru ini menjadi tantangan untuk memperbaiki apa yang menjadi kendala agar lebih baik kedepannya. Untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi diatas, Ibu Siti Yulaikhah sebagai pendamping PKH di Desa Karangwader rutin melakukan koordinasi dengan pendamping lainnya se-Kecamatan Penawangan. Setiap hari para pendamping PKH harus datang ke kantor untuk melakukan rapat koordinasi yang disebut *team work*. Jika ada salah satu pendamping mengalami masalah maka pendamping lainnya bisa membantu memberikan saran atau jalan keluar dari masalah atau kendala yang terjadi.”

Kendala selanjutnya juga diungkapkan oleh Siti Yulaikhah sebagai pendamping yakni:

“Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Karangwader berjalan kurang optimal, karena masih banyak keluarga miskin yang seharusnya pantas menerima bantuan tetapi tidak terdata di BDT, yang terjadi di desa karangwader kebanyakan KPM PKH lansia yang mendapatkan bantuan padahal masih ada komponen lain yang juga dapat dikategorikan wajib menerima bantuan sosial. Hal ini pula yang menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat terhadap peserta PKH. Untuk itu pendampig PKH harus melakukan 2 kali validasi dalam setahun. Kemudian pendamping juga harus memverifikasi ulang dilapangan untuk mengetahui layak atau tidaknya untuk menerima bantuan. Keluarga

penerima manfaat PKH tidak hanya menerima bantuan secara tunai tapi juga menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu bantuan kedua setelah PKH dari Kementrian Sosial. BPNT ini mulai tahun 2019 yang berupa bahan pokok seperti beras, telur, ikan, buah dan sayuran. Tujuannya adalah untuk menambah gizi masyarakat miskin agar kesehatan dan kehidupannya membaik.”

Selanjutnya dari peserta PKH sendiri Yakni Ibu Munirah, mereka tidak mengalami masalah ataupun kendala yang serius selama implementasi bantuan PKH berlangsung di Desa Karangwader. Peserta PKH merasa disetiap pencairan jumlah dana bantuan yang diterima berbeda-beda per-pencairan dana. Hal ini tidak diketahui oleh para KPM PKH, tetapi disetiap pertemuan kelompok pendamping PKH memberikan penjelasan mengenai kendala masalah yang dialami oleh KPM PKH.⁷

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Karakteristik penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Karang Wader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

Sebuah program yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH) sedang dikembangkan untuk membantu masyarakat pedesaan dan perkotaan yang kurang mampu. Indonesia mengadopsi inisiatif keluarga harapan PKH pada tahun 2007 dengan tujuan mengevaluasi semua alat yang diperlukan untuk pelaksanaan PKH, seperti strategi penargetan, sistem pembayaran, dan pengaduan masyarakat.

Calon peserta PKH dipilih berdasarkan beberapa faktor, antara lain Komponen Kesehatan yang meliputi ibu hamil, nifas, ibu menyusui, dan balita (0-6 tahun). Komponen pendidikan terdiri dari anak yang menempuh pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan sederajat SMA/MA. Dan komponen Kesejahteraan sosial meliputi lansia, penyandang disabilitas. Jadi masyarakat miskin yang masuk kedalam kriteria komponen peserta PKH berhak mendapatkan bantuajn PKH apabila datanya terdapat di BDT.⁸

⁷ Munirah, wawancara oleh penulis, 11 Mei 2022, wawancara 3, Transkrip.

⁸ Kementerian Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024*, 2021: 22&23.

Pada tahun 2007 melakukan uji coba di tujuh provinsi Dengan target mencapai 1,5 juta Rumah Tangga Sangat Miskin, PKH telah dilaksanakan mulai tahun 2012 di seluruh provinsi (33 provinsi) dan menjangkau 169 kabupaten dan kota (RSTM). Untuk itu diperlukan perangkat pendukung untuk melaksanakan tujuan program ini, selain lembaga sumber daya manusia. Pendamping PKH merupakan untuk paling depan dalam pelaksanaan PKH. Karena pendamping PKH sebagai wakil dari mereka (masyarakat-masyarakat miskin) yang tidak memiliki suara untuk memperjuangkan hak-hak mereka.⁹

Bagi KPM PKH yang dianggap mampu dalam artian tidak termasuk dalam kriteria komponen yang ditetapkan oleh pemerintah, pendamping PKH bersama pemerintah desa akan melakukan pengeluaran dari kepesertaan PKH secara paksa apabila mereka tidak mau keluar sendiri. Tetapi, pemerintah desa tidak beri wewenang untuk mengalihkan bantuan tersebut ke RSTM lainnya. Jadi, bagi rumah tangga sangat miskin yang belum terdata di BDT pemerintah setempat akan mencoba mengajukan bantuan lainnya ke pemerintah pusat. Agar masyarakat miskin di desa karangwader teratasi dan tidak menciptakan generasi yang rendah sumber daya dan tidak mengantungkan hidupnya dengan pemerintah.

2. Analisis Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Karang Wader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

Pelaksanaan penyaluran dana bantuan PKH kepada peserta PKH diberikan melalui ATM yang telah diberikan kepada seluruh peserta PKH. Besarnya bantuan yang diberikan kepada KPM PKH tergantung dengan kriteria komponen yang dimiliki oleh peserta. Komponen tersebut meliputi pertama komponen kesehatan meliputi ibu hamil/nifas sebesar Rp. 3.000.000 per tahunnya, untuk anak usia dini menerima sebesar 3.000.000 per tahunnya. Kedua Komponen pendidikan dengan tiga tingkatan yaitu SD (Rp. 900.00), SMP (Rp. 1.500.000), SMA (Rp. 2.000.000) per tahunnya. Ketiga komponen kesejahteraan sosial meliputi

⁹ Habibullah dan Ivo Noviana, *Kebijakan pendamping Program keluarga harapan*, (Jakarta Timur: P3KS Press, 2013), 1&2.

disabilitas berat menerima sebesar Rp. 2.400.000 pertahunnya dan lanjut usia sebesar Rp. 2.400.000 per tahun. Dalam penyalurannya dana bantuan PKH dibagikan secara bertahap empat kali dalam setahun.¹⁰

Pelaksanaan penyaluran bantuan PKH ini memiliki beberapa mekanisme antara lain:¹¹

- a. Untuk membuka rekening penerima bansos, Bank Penyalur (BP) menggunakan data peserta PKH untuk membuka rekening secara terpusat.
- b. Sosialisasi dan edukasi penyaluran PKH, termasuk interaksi langsung dengan peserta PKH oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan bank penyalur kepada pelaksana PKH di daerah atau pendamping sosial terkait).
- c. Penyaluran KKS ke KPM, Bank Penyalur menyalurkan KKS, Buku Tabungan, dan Surat Pin kepada Penerima PKH, yang kemudian Bank Penyalur bekerjasama dengan Dinas Sosial setempat.
- d. Penyaluran bantuan, transfer buku dari penyalur bansos kepada pengguna bansos melalui bank penyalur
- e. Penarikan uang bantuan PKH adalah kegiatan transaksi penarikan dana PKH yang dilakukan oleh KPM PKH melalui ATM, kantor bank, agen bank, dan e-warong.
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan PKH adalah pencocokan dan pengecekan administrasi, data, dan dana penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap antara pelaksana PKH dengan bank penyalur. Dengan memanfaatkan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH di setiap KPM PKH yang telah mendapat dukungan.
- g. Pemanfaatan Bantuan Sosial, bantuan sosial KPM PKH diharapkan dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendorong pencapaian tujuan PKH.

Pada model Van Meter dan Van Hom mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan yakni:¹²

¹⁰ Siti Yulaikhah, Wawancara oleh penulis, 10 Mei 2022, wawancara 1, Transkrip.

¹¹ Kementerian Sosial, Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021:10.

¹² Junine Vebry makasenda dkk, “implemetasi program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan di kota manado (suatu studi di kecamatan tuminting)”, jurnal jurusan ilmu pemerintahan, vol. 3, no. 3 (2019):3

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, pelaksanaan PKH di desa karangwader sepenuhnya belum berjalan optimal karena peserta PKH belum bisa memanfaatkan bantuannya dengan maksimal atau bisa dibiling dibuat kebutuhan sehari-hari.
- 2) Kinerja kebijakan, dengan adanya bantuan PKH ini masyarakat lebih menyadari betapa pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk masa depannya, sehingga adanya PKH membantu mereka masyarakat miskin menyekolahkan anaknya dan kesehatannyapun terjamin.
- 3) Sumber daya, dilihat dari sumber daya manusia yang kurang di desa karangwader, karena masih banyak peserta PKH yang tidak memiliki keterampilan dalam diri mereka. Adanya PKH ini dapat merefresh mindset mereka untuk lebih berkembang.
- 4) Komunikasi, dalam pelaksanaan bantuan PKH berlangsung cukup baik karena para pendamping dapat berkomunikasi dengan baik dengan seluruh peserta PKH, hanya saja jika berkomunikasi dengan lansia kurang menguasai percakapan dalam artian kurang nyambung.
- 5) Karakteristik pelaksanaan, sebagai pendamping sudah melaksanakan tugasnya sebagai motivator, dan mengadakan pertemuan rutin. Hanya saja peserta PKH masih ada yang menggunakan dana bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan komponennya.
- 6) Lingkungan sosial, lingkungan yang maju dan kemajuan teknologi mampu mempermudah proses pelaksanaan bantuan PKH.
- 7) Sikap pelaksana, dari hal ini pemerintah cukup baik mendukung adanya implementasi PKH di Desa Karangwader dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat miskin untuk mandiri.

Dilihat dari tujuh indikator diatas bahwa pendamping PKH memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan PKH di Desa Karangwader.

3. Analisis Kendala Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Karang Wader Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

Dalam pelaksanaan semua program pasti terdapat kendala yang akan dihadapi baik kendala yang bersifat kecil

maupun besar. Tujuan utama adanya PKH adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Ada salah satu tujuan yang dirasakan oleh pendamping belum terlaksana yaitu meningkatkan taraf perekonomian keluarga dengan cara pemberdayaan. Belum tercapainya tujuan tersebut dikarenakan para peserta PKH jarang yang memiliki keterampilan untuk mengasah dirinya. Maka, para pendamping PKH mengadakan kegiatan rutin yang wajib diikuti oleh semua peserta PKH agar terciptanya keterampilan mereka dengan tujuan untuk memberdayakan mereka agar dapat mengaplikasikan keterampilannya menjadi ladang perekonomian.¹³

Secara realita dilapangan masih banyak masyarakat yang mengaku miskin untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah termasuk PKH. Kendala lainnya pencairan dana bantuan peserta PKH tidak menunggu info dari pendamping PKH, karena dana langsung masuk ke masing-masing ATM yang dimiliki seluruh peserta PKH. Karena peserta PKH dapat mengecek langsung bantuan sudah cair atau belum, karena belum ada ketentuan tanggal pencairan dana. Kemudian saat pengambilan dana bantuan peserta PKH harus menyalurkan minimal Rp 50.000 di masing-masing ATM. Untuk kendala lainnya yakni masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH tetapi masih belum terkafer dalam data kepesertaan. Permasalahan ini karena data yang digunakan adalah data yang diambil dari sensus penduduk 2010 tetapi bantuan PKH muncul tahun tahun 2014 sehingga data tersebut sudah tidak valid untuk digunakan dalam memilih calon peserta PKH. Sehingga pada tahun 2019 pendamping PKH dan pihak kecamatan melakukan pelebelan bagi seluruh peserta PKH. Tujuannya untuk mengeluarkan peserta yang sudah dianggap tidak layak mendapatkan bantuan dan memberi label bagi peserta yang masih mampu menerima bantuan PKH.¹⁴

Dengan adanya beberapa hal diatas para pendamping harus lebih teiti dalam menyurvei calon KPM PKH ataupun peserta KPM PKH yang sudah terdaftar sebagai penerima

¹³ Siti Yulaikhah, Wawancara oleh penulis, 10 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Siti yulaikhah, wawancara ole penulis, 10 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

bantuan. Tujuannya agar tidak terjadi salah sasaran dalam pemberian bantuan yang ditunjuk untuk masyarakat miskin yang termasuk dalam kriteria komponen anak sekolah, lansia, disabilitas dan ibu hamil atau balita. Kemudian kesadaran akan pentingnya pertemuan kelompok yang wajib diikuti oleh seluruh peserta PKH dan pendamping masih kurang di perhatikan. Tidak hanya itu, peserta PKH juga wajib mengetahui kesehatan untuk ibu hamil atau balita, lansia dan pentingnya pendidikan untuk anak mereka. Sanksi yang bagi mereka yang tidak memperhatikan kewajiban peserta akan menahan bantuannya dengan tujuan agar peserta mau melakukan kewajiban dari peserta penerima bantuan PKH.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh pendamping PKH di Desa Karangwader. Kendala tersebut yakni belum terlakannya peningkatan perekonomian keluarga dengan cara pemberdayaan. Belum tercapainya tujuan karena terkendala dalam keterampilan yang tidak dimiliki oleh peserta PKH. Masih banyak masyarakat yang mesngaku miskin hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kurang nya koordinasi anatar pendamping dengan pihak pemerintah desa juga kurangnya koordinasi peserta PKH dengan pendamping. Data yang digunakan dalam menentukan calon penerima PKH dari data BDT tidak valid sehingga terjadi salah sasaran atau kurang tepat. Masih banyak masyarakat miskin yang belum terdata di BDT, dan dalam pengambilan dana bantuan para peserta tidak menunggu informasi dari pendamping dan masih banyak peserta PKH yang apabila dana belum cair selalu (*jagakke*) tanya kapan dana PKH cair sehingga dalam hal ini belum terkontrol dengan baik.

Sedangkan para KPM PKH, tidak memiliki masalah yang serius. Hal itupun langsung segera terselesaikan saat pertemuan rutin kelompok KPM PKH yang langsung didampingi oleh pendamping PKH. Jika ada masalahpun misalnya peserta PKH mengalami kendala dalam pencairan dana yang belum sampai ke rekening peserta PKH, mereka KPM PKH akan bertanya atau mengadu langsung ke pendamping PKH, namun tidak diwaktu yang sama karena dana bantuan cair tidak selalu bersamaan. Jadi mereka akan mengutarakan kendala yang dihadapi saat pertemuan rutin kelompok. Kemudian dijelaskan oleh pendamping PKH

faktor-faktor yang mempengaruhi cair atau tidaknya dana bantuan PKH serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dana yang cair sesuai atau tidak dengan kriteria komponen penerima PKH. Namun, Ibu Siti Yulaikhah sebagai pendamping juga aktif melakukan koordinasi dengan KPM PKH maka para peserta PKH merasa tidak ada masalah yang serius.

Solusi tersebut antara lain pendamping harus melaksanakan tugasnya secara maksimal, seperti mengontrol dan memantau seluruh peserta PKH. Kemudian untuk mengatasi kendala-kendala lainnya pendamping PKH langsung turun tangan untuk menyurvei satu persatu masyarakat miskin yang layak atau tidaknya menerima bantuan.

